

DIGITALISASI UMKM MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN QRIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKU USAHA DI DESA SIMPANG KUBU

Zetra Hainul Putra¹, Aliya Latifa Yusinta², Raeni Erika Rosiana³, Muhammad Rasyid Badwi⁴, Wildho Pernando⁵, Putri Ayu Sagala⁶, Yunita Lestari⁷, Dwi Febriani⁸, Indah Humairah Amiyendri⁹, Della Putri Agusti¹⁰, Elvina Fahlya¹¹

Universitas Riau, Indonesia

Email : aliya.latifa3912@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital pada sektor usaha di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya berkaitan dengan penggunaan sistem pembayaran non-tunai oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Desa Simpang Kubu, pemanfaatan QRIS dalam kegiatan transaksi usaha belum diterapkan secara luas karena masih terdapat keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai fungsi, manfaat, dan prosedur penggunaannya. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk memperkenalkan QRIS sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembayaran digital. Pendampingan diberikan mulai dari pemberian pemahaman mengenai QRIS sebagai standar kode respons cepat Indonesia, proses pembuatan akun, hingga praktik penggunaannya untuk mendukung transaksi usaha tanpa uang tunai. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR), sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima kegiatan, tetapi turut terlibat dalam setiap proses yang dilakukan. Tahapan kegiatan mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemantauan. Informasi selama kegiatan diperoleh melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Pendampingan yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif terhadap kemampuan dan keyakinan pelaku UMKM dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Sebagian besar peserta dapat menyelesaikan proses aktivasi QRIS dan selanjutnya mampu mengoperasikannya secara mandiri, baik dalam menerima pembayaran maupun memeriksa transaksi yang masuk. Walaupun demikian, penerapan pembayaran digital belum sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Keterbatasan literasi digital pada beberapa pelaku usaha serta pola transaksi masyarakat yang masih terbiasa menggunakan uang tunai menjadi hambatan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, keberlanjutan pendampingan dan pemantauan diperlukan agar penggunaan QRIS dapat dipertahankan dan dikembangkan, sehingga turut mempercepat proses digitalisasi UMKM serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di lingkungan desa.

Article History

Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

Kata Kunci : QRIS, Pembayaran Digital, UMKM, Digitalisasi, Pengabdian kepada Masyarakat.

ABSTRACT

Digital transformation in rural business sectors faces various challenges, particularly regarding the adoption of cashless payment systems by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In Simpang Kubu Village, the use of QRIS for business transactions has not yet been widely adopted due to limited knowledge among MSME operators regarding its functions, benefits, and usage procedures. This situation prompted a community service initiative aimed at introducing QRIS and enhancing the ability of MSME operators to utilize digital payments. The assistance provided ranged from explaining QRIS as Indonesia's standard Quick Response code and guiding the account creation process to facilitating practical application for cashless business transactions. The initiative employed a Participatory Action Research (PAR) approach, ensuring that MSME operators were not merely passive recipients but active participants throughout the process. The stages of the activity included preparation, implementation, evaluation, and monitoring. Data was gathered through direct observation, semi-structured interviews, and documentation. The assistance yielded positive results regarding the MSME operators' competence and confidence in using digital payment systems. Most participants successfully completed the QRIS activation process and subsequently operated the system independently, handling both payment acceptance and transaction monitoring. However, the implementation of digital payments was not entirely without challenges. limited digital literacy among some business owners and a local consumer habit of relying on cash acted as obstacles. Therefore, continued assistance and monitoring are essential to sustain and expand QRIS usage, thereby accelerating MSME digitalization and strengthening the digital economic ecosystem within the village.

Keywords: QRIS, Digital Payment, MSMEs, Digitalization, Community Service.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemajuan teknologi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan digital agar mampu memenuhi perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi. Salah satu bentuk transformasi yang terjadi adalah pergeseran pola transaksi masyarakat dari pembayaran secara tunai (*cash*) menuju pembayaran secara non tunai

(*cashless*) dengan memanfaatkan teknologi digital. Perubahan tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan perangkat digital, akses internet yang semakin luas, serta kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih praktis, cepat, aman, efisien, dan transparan. Penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pencatatan keuangan, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing usaha di era ekonomi digital.

Perkembangan teknologi turut mendorong perubahan dalam sistem pembayaran yang digunakan masyarakat. Dalam aktivitas ekonomi, sistem pembayaran berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi perpindahan dana dari pihak pembeli kepada penjual dalam suatu transaksi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang praktis dan efisien, penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran semakin berkembang melalui hadirnya pembayaran digital. Sistem ini memungkinkan dana disimpan, diproses, dan dipindahkan secara elektronik dengan memanfaatkan berbagai instrumen, termasuk kartu pembayaran dan uang elektronik (Siregar et al., 2025). Dengan kemudahan yang ditawarkan, pembayaran digital kini semakin berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi.

Salah satu bentuk perkembangan pembayaran digital di Indonesia ditunjukkan melalui penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Kehadiran QRIS ditujukan untuk memperluas sekaligus mendorong penggunaan pembayaran digital, terutama bagi pelaku UMKM. Melalui QRIS, berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat terhubung dalam satu kode QR yang sama, sehingga pelaku usaha tidak perlu menyediakan kode QR yang berbeda untuk setiap layanan pembayaran yang digunakan (Natsir et al., 2023). Penggunaan standar tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi tanpa harus mempertimbangkan perbedaan penyedia layanan pembayaran. Bagi UMKM, penerapan QRIS tidak hanya membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien, tetapi juga memberikan kesempatan untuk terhubung dengan konsumen dari berbagai layanan dompet digital serta memperluas akses pasar melalui kebiasaan transaksi masyarakat yang semakin mengarah pada sistem digital.

Bagi pelaku UMKM, penerapan QRIS tidak hanya mempermudah penerimaan pembayaran, tetapi juga dapat membantu dalam pengelolaan kegiatan usaha. Transaksi secara digital membuat penjual tidak perlu menyiapkan uang pecahan untuk memberikan kembalian, sehingga proses pembayaran dapat berlangsung dengan lebih praktis. Di samping itu, setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan tercatat secara otomatis, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan pencatatan dan memantau arus transaksi. Penggunaan sistem tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang sering muncul dalam pengelolaan transaksi tunai. Kemudahan dan efisiensi yang dihasilkan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada konsumen serta membantu pelaku UMKM mengelola usahanya secara lebih tertib.

UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian karena keberadaannya berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Meskipun demikian, penerapan sistem pembayaran digital pada UMKM di wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku UMKM di Desa Simpang Kubu yang sebagian besar masih menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi. Ketergantungan terhadap pembayaran tunai dapat menyulitkan pelaku usaha dalam menjaga keamanan uang, mencatat

pergerakan kas secara tepat, serta terbatasnya pilihan pembayaran bagi konsumen yang telah terbiasa menggunakan transaksi nontunai. Sebaliknya, penggunaan QRIS dapat memberikan solusi karena memungkinkan proses pembayaran berlangsung lebih efisien, membantu mempercepat rekonsiliasi keuangan, menekan potensi kesalahan dalam pengelolaan uang tunai, dan memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih beragam (Farhan & Shifa, 2023).

Kondisi pelaku usaha di Desa Simpang Kubu menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi lokal belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan teknologi pembayaran digital. Desa ini memiliki berbagai usaha rumah tangga yang bergerak dalam bidang kuliner, perdagangan, dan jasa sehingga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Riau, masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai akun QRIS dan belum mengetahui tahapan maupun manfaat dari penggunaannya. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan literasi digital dan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, serta pemahaman yang masih rendah mengenai fungsi QRIS. Bahkan, ditemukan pula anggapan di kalangan sebagian pelaku usaha bahwa penggunaan QRIS membutuhkan biaya yang besar dan proses pendaftaran yang sulit. Padahal, Bank Indonesia telah menyediakan skema pendaftaran QRIS tanpa biaya bagi pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori usaha mikro.

Peningkatan penggunaan QRIS di kalangan UMKM masih membutuhkan dukungan, khususnya bagi pelaku usaha yang berada di wilayah perdesaan. Persoalan yang dihadapi tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menggunakannya. Munir et al. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan digitalisasi UMKM pada era revolusi industri 5.0 perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu menghadapi persaingan pasar. Hal serupa disampaikan oleh Sriekaningsih et al. (2022), yang menemukan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital menjadi salah satu penyebab QRIS belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, bukan semata-mata karena persoalan kesiapan teknologi. Ibrahim dan Nisa (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penggunaan QRIS belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya pemanfaatan dalam kegiatan UMKM, sehingga penguatan literasi digital dan pendampingan masih diperlukan. Dalam konteks tersebut, pendampingan secara langsung menjadi penting karena pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat mempraktikkan tahapan pendaftaran dan penggunaan QRIS serta mendapatkan bantuan ketika mengalami kendala dalam penerapannya. Upaya ini diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan QRIS secara lebih optimal sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KUKERTA Universitas Riau kemudian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pembuatan dan pemanfaatan QRIS bagi pelaku UMKM di Desa Simpang Kubu. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha mengenal QRIS secara lebih menyeluruh, mulai dari memahami konsep, manfaat, hingga keamanan dalam melakukan transaksi. Selain itu, pendampingan diberikan secara langsung selama proses pendaftaran akun melalui aplikasi penyedia jasa pembayaran agar pelaku UMKM dapat mengikuti setiap tahapannya dengan baik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mulai menggunakan pembayaran non-tunai dalam aktivitas bisnis sehari-hari sebagai bagian dari proses digitalisasi sistem pembayaran di tingkat desa. Pada akhirnya, penerapan QRIS secara mandiri diharapkan dapat membantu UMKM mengelola keuangan usaha dengan lebih efisien, membuka peluang jangkauan

pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kemampuan bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Simpang Kubu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kelompok sasaran. Khususnya mereka yang belum memiliki atau belum memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, digunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan pelaku UMKM sebagai pihak yang terlibat secara aktif selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan tersebut dimulai sejak pengenalan dan identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan proses pendampingan hingga penerapan solusi yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Pendekatan partisipatif dipilih karena penggunaan sistem pembayaran digital tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi, tetapi juga pemahaman dan praktik secara langsung oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan dinilai lebih sesuai dibandingkan sosialisasi yang hanya berlangsung secara satu arah. Penentuan pelaku UMKM yang menjadi sasaran dilakukan berdasarkan hasil observasi awal dan pendataan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KUKERTA Universitas Riau.

Secara sistematis, pelaksanaan program ini terbagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap pertama, yaitu tahap persiapan, meliputi kegiatan observasi lapangan secara langsung untuk memetakan kondisi UMKM di Desa Simpang Kubu, dan wawancara awal dengan pelaku usaha guna mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sistem pembayaran digital, serta kesiapan dalam mengadopsi QRIS. Tahap ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses digitalisasi pembayaran, seperti keterbatasan literasi digital, minimnya informasi mengenai manfaat QRIS, serta anggapan bahwa proses pendaftaran QRIS rumit dan memerlukan biaya yang besar. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan transaksi tunai, belum memiliki akun QRIS, serta memiliki keterbatasan informasi mengenai manfaat dan prosedur pendaftarannya. Temuan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi pendampingan yang akan diterapkan pada tahap berikutnya.

Tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, terdiri atas kegiatan sosialisasi mengenai konsep, manfaat, dan keamanan transaksi QRIS, yang bertujuan untuk membangun pemahaman dasar sekaligus menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan secara langsung dalam proses pendaftaran akun QRIS melalui aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran, mulai dari pengisian data usaha, melakukan verifikasi data, hingga QRIS berhasil diterbitkan. Setelah akun QRIS aktif, pelaku UMKM juga diberikan simulasi dan praktik penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari, termasuk pendampingan mengenai cara menerima pembayaran menggunakan QRIS, memverifikasi transaksi yang berhasil, hingga memeriksa riwayat transaksi pada aplikasi. Penyampaian dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM di desa.

Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi dan monitoring, dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sekaligus menilai tingkat pemahaman serta penggunaan QRIS oleh pelaku usaha setelah pendampingan diberikan. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, diskusi, dan wawancara singkat dengan pelaku UMKM setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Aspek yang dievaluasi meliputi pemahaman terhadap materi

yang telah diberikan, keberhasilan proses pendaftaran dan aktivasi QRIS, kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan QRIS secara mandiri, serta respons terhadap penerapan sistem pembayaran digital dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kegiatan monitoring juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengoperasikan QRIS. Hasil evaluasi dan monitoring tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rekomendasi tindak lanjut guna mendukung keberlanjutan implementasi program di masa mendatang.

Data dan informasi dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif terhadap aktivitas transaksi pelaku UMKM, wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan kendala pelaku usaha terkait penerapan pembayaran digital, serta dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan yang diambil selama proses sosialisasi dan pendampingan berlangsung. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat saling melengkapi.

Keberhasilan program diukur berdasarkan jumlah UMKM yang berhasil memiliki QRIS serta meningkatnya pemahaman peserta mengenai pemanfaatan pembayaran digital sebagai bagian dari upaya mendukung digitalisasi UMKM di tingkat desa. Indikator tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana program ini mampu mendukung upaya digitalisasi sistem pembayaran UMKM di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pelaku UMKM Sebelum Pendampingan

Hasil observasi lapangan dan wawancara awal yang dilakukan pada tahap persiapan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Simpang Kubu masih mengandalkan transaksi tunai sebagai metode pembayaran utama. Dari sebagian besar pelaku usaha yang menjadi sasaran observasi, mayoritas belum memiliki akun QRIS dan belum pernah menerima sosialisasi mengenai sistem pembayaran digital secara khusus. Rendahnya tingkat literasi digital tersebut sejalan dengan ditemukannya sejumlah persepsi keliru di kalangan pelaku usaha, antara lain anggapan bahwa proses pendaftaran QRIS memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit, padahal Bank Indonesia telah menetapkan skema pendaftaran tanpa biaya bagi UMKM kategori usaha mikro.

Temuan ini memperkuat hasil kajian Sriekaningsih et al. (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya pemanfaatan QRIS pada UMKM lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap sistem pembayaran digital, bukan karena ketidaksiapan infrastruktur teknologi. Kondisi serupa juga dilaporkan oleh Awaluddin et al. (2025) dalam pendampingan QRIS di kawasan pesisir, yang menemukan bahwa hambatan utama adopsi pembayaran digital pada UMKM perdesaan berakar pada minimnya pemahaman teknologi dan sistem pembayaran elektronik, bukan pada keterbatasan akses jaringan atau perangkat. Dengan demikian, kondisi awal UMKM di Desa Simpang Kubu dapat dikategorikan sebagai representasi umum dari tantangan digitalisasi UMKM di wilayah perdesaan Indonesia, sehingga pendekatan pendampingan partisipatif menjadi relevan untuk diterapkan.

Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran QRIS

Kegiatan sosialisasi mengenai konsep, manfaat, dan keamanan transaksi QRIS diikuti oleh pelaku UMKM di berbagai sektor, meliputi kuliner, perdagangan, dan jasa. Selama sesi sosialisasi, para pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terutama ketika dijelaskan mengenai kemudahan transaksi dan tidak perlunya menyediakan uang kembalian dalam nominal kecil. Pada tahap pendampingan pendaftaran, tim KUKERTA membantu pelaku usaha secara langsung mulai dari pengisian data usaha, verifikasi dokumen, hingga penerbitan

kode QRIS. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa 7 dari 10 pelaku usaha yang didampingi berhasil memiliki akun QRIS aktif hingga akhir kegiatan, sementara sebagian kecil peserta masih menghadapi kendala seperti ketiadaan aplikasi pembayaran digital dan masih dominannya penggunaan pembayaran tunai oleh konsumen sehingga pelaku usaha belum merasa mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran.

Hasil ini konsisten dengan temuan Rozikin et al. (2026) dalam program pengabdian serupa di Desa Gulon, yang melaporkan keberhasilan sejumlah UMKM mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran meskipun kendala literasi digital tetap ditemukan pada sebagian peserta. Selain itu, pendampingan langsung dalam proses pendaftaran QRIS terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah karena memungkinkan pelaku usaha memahami setiap tahapan secara kontekstual sekaligus menyelesaikan kendala teknis pada saat itu juga. Sejalan dengan hal tersebut, simulasi dan praktik penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari yang diberikan pada tahap ini turut membantu peserta membangun kepercayaan terhadap keandalan sistem pembayaran digital, sebagaimana juga ditemukan oleh Puspita et al. (2025) bahwa faktor kemudahan, manfaat, dan kepercayaan merupakan determinan utama yang mendorong niat pelaku usaha untuk menggunakan QRIS secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan dan Penyerahan QRIS kepada Pelaku UMKM Desa Simpang Kubu

Hasil Evaluasi dan Monitoring Pascapendampingan

Evaluasi yang dilakukan melalui observasi langsung, diskusi, dan wawancara singkat pascapendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan manfaat QRIS dibandingkan kondisi awal. Sebagian besar peserta yang telah memiliki akun QRIS aktif mampu mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri, termasuk dalam menerima pembayaran, memverifikasi transaksi, serta memeriksa riwayat transaksi pada aplikasi. Meskipun demikian, kegiatan monitoring juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan literasi digital pada pelaku usaha berusia lanjut, kekhawatiran terhadap keamanan data transaksi, dan preferensi sebagian konsumen di desa yang masih terbiasa bertransaksi secara tunai.

Temuan mengenai kendala pascapendampingan ini sejalan dengan hasil penelitian pada Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia yang melaporkan bahwa rendahnya literasi digital dan ketiadaan aplikasi pembayaran digital menjadi faktor dominan penghambat penggunaan QRIS oleh UMKM, sehingga pendampingan QRIS perlu dipandang sebagai tahap awal dari proses transformasi perilaku digital yang membutuhkan dukungan berkelanjutan (Damayanti et al., 2023). Hal ini menekankan bahwa literasi keuangan digital dan pemahaman terhadap keamanan transaksi menjadi prasyarat penting agar adopsi sistem pembayaran digital oleh UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas kepemilikan akun.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pendampingan pembuatan QRIS di Desa Simpang Kubu menunjukkan bahwa pendekatan *participatory action research* yang melibatkan pelaku UMKM secara aktif mulai dari identifikasi masalah hingga penerapan solusi mampu mendorong peningkatan pemahaman sekaligus adopsi nyata terhadap sistem pembayaran nontunai. Ketercapaian tiga tujuan program, yaitu peningkatan pemahaman konsep dan manfaat QRIS, keberhasilan pendaftaran akun QRIS, serta dorongan peningkatan transaksi nontunai, menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi satu arah. Temuan ini memperkuat argumen Munir et al. (2024) bahwa digitalisasi UMKM di era revolusi industri 5.0 menuntut peningkatan kompetensi digital pelaku usaha secara berkelanjutan, bukan hanya melalui transfer informasi satu kali.

Selain meningkatkan pemahaman, pendampingan pembuatan QRIS juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku UMKM. Dengan adanya QRIS, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital hanya menggunakan satu kode QR. Kondisi ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis juga membantu pelaku usaha dalam melakukan monitoring pemasukan sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib.

Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki akun QRIS aktif pada penelitian ini juga sejalan dengan manfaat ekonomi yang dilaporkan dalam berbagai kajian sebelumnya. Alifia et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan QRIS berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan harian pedagang UMKM karena memperluas basis pelanggan, termasuk konsumen yang tidak membawa uang tunai. Studi komparatif yang dilakukan Popang et al. (2023) turut membuktikan adanya perbedaan pendapatan penjualan UMKM yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan QRIS. Dengan demikian, keberhasilan pelaku UMKM di Desa Simpang Kubu dalam mengadopsi QRIS berpotensi memberikan dampak serupa terhadap efisiensi pencatatan keuangan dan perluasan akses pasar, meskipun pengukuran dampak terhadap peningkatan pendapatan secara kuantitatif memerlukan periode observasi yang lebih panjang.

Meskipun demikian, selama pelaksanaan kegiatan masih ditemukan beberapa kendala. Sebagian pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan kesiapan pengguna dalam mengadopsi teknologi baru. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Srikaningsih et al. (2022) yang menyebutkan bahwa rendahnya tingkat adopsi QRIS pada UMKM lebih banyak disebabkan oleh rendahnya literasi digital dibandingkan keterbatasan teknologi.

Selain itu, kendala yang masih ditemukan pada tahap evaluasi, khususnya terkait literasi digital menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM di tingkat desa tidak dapat dicapai secara instan melalui satu kali intervensi. Ibrahim & Nisa (2024) menegaskan bahwa meskipun tren penggunaan QRIS pada UMKM terus meningkat, tingkat pemanfaatannya masih memerlukan penguatan literasi digital serta pendampingan yang berkelanjutan agar adopsi teknologi tidak berhenti pada tahap kepemilikan akun semata. Oleh karena itu, program pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi pembayaran digital di tingkat desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini memberikan kontribusi praktis terhadap upaya digitalisasi sistem pembayaran UMKM di Desa Simpang Kubu. Peningkatan pemahaman peserta, keberhasilan proses aktivasi QRIS, serta meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam menggunakan pembayaran digital menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung dan

partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam mendorong transformasi digital pada pelaku usaha mikro di wilayah perdesaan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pembuatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pelaku UMKM di Desa Simpang Kubu berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep, manfaat, dan penggunaan sistem pembayaran digital serta mendorong adopsi QRIS sebagai metode pembayaran nontunai. Pendekatan pendampingan yang melibatkan pelaku UMKM secara aktif pada setiap tahapan kegiatan terbukti efektif dalam mengatasi kendala dalam implementasinya. Keberhasilan aktivasi akun QRIS pada sebagian besar UMKM serta meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan QRIS menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung merupakan strategi yang tepat untuk mendukung transformasi digital UMKM di tingkat desa.

Penerapan QRIS memberikan berbagai manfaat bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui transaksi yang lebih cepat, praktis, dan aman. Penggunaan QRIS juga mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem pembayaran digital ini memperluas akses pasar dengan menyediakan metode pembayaran yang lebih fleksibel dan mendukung pelaku UMKM dalam memantau dan menganalisis transaksi.

Meskipun demikian, implementasi pembayaran digital masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, dan kebiasaan sebagian masyarakat yang masih menggunakan pembayaran tunai. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan untuk memperkuat literasi keuangan digital serta mendorong pemanfaatan QRIS secara optimal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai, tetapi juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi digital di tingkat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah, H. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 102-115.
- Awaluddin, S. P., Awaluddin, M., Suci, Y. R., & Fahmi, M. Z. (2025). Peningkatan Literasi Digital Pemanfaatan Qris pada Pelaku UMKM di Desa Pesisir Pantai: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4486-4493.
- Damayanti, U. R., Nirmala, A. R., Nurani, R., & Kuswara, C. N. (2023). Literasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru. *BATIK: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 1(1), 17-21.
- Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan metode pembayaran QRIS pada setiap UMKM di era digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1198-1206.
- Ibrahim, M. D., & Nisa, F. L. (2024). Penggunaan QRIS dalam pembayaran pada UMKM di wilayah Rungkut Surabaya. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 4(1), 62-66.
- Munir, M., Nisa, A. R., & Wafa, K. (2024). Digitalisasi UMKM Di Era Industri 5.0 Melalui Sosialisasi QRIS, SIAPIK dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Suru. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1-18.

- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan QRIS sebagai Alat pembayaran Digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154-1163.
- Popang, P. S., Pundissing, R., & Batara, M. (2023). Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Setelah Menggunakan QRIS Di Pasar Seni To'pao, Kabupaten Toraja Utara. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(4), 22-30.
- Puspita, D. W., Hatta, A. M., Rahajuni, D., & Anggraeni, O. (2025). ANALISIS FAKTOR KEMUDAHAN, MANFAAT, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI INSTRUMEN PEREKONOMIAN DIGITAL: ANALISIS FAKTOR KEMUDAHAN, MANFAAT, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI INSTRUMEN PEREKONOMIAN DIGITAL. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 1-16.
- Rozikin, M., Nurvitasari, A., Cahyaningsih, R., Rahma, A. R., Azzahra, D. S., Krishnaprabhacitta, L., Khaerani, A. Z., Putra, A. I. M., Arifianti, N., & Saputro, R. A. (2026). Digitalisasi UMKM melalui implementasi QRIS: Program pengabdian masyarakat di Desa Gulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 7245-7250.
- Siregar, A. J., Aryani, A. D., Utami, D. A., & Nurbaiti, N. (2025). Penerapan penggunaan pembayaran digital QRIS pada UMKM. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 344-353.
- Sriekaningsih, A., Riyanto, S., & Prakasa, A. (2022). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Tarakan. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 92-101.